J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.6, No.6, Nopember 2026

Peningkatan Literasi Manajemen Keuangan Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Sukabumi

Idel Eprianto[1*], Hasanuddin[2], Bungaran Saing[3], Achmad Fauzi[4]
[1,2,3,4]Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Penulis Korespondensi: idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History:
Received: 24-09-2026
Revised: 24-10-2026
Accepted: 27-10-2026

Keywords: *financial literacy; household financial management; economic welfare; community service; Sekarwangi Village*

Abstract: *Low financial management literacy remains a fundamental problem for rural communities, as reflected in the gap between the rural (59.60%) and urban (70.89%) financial literacy indices in Indonesia's 2025 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK). In Sekarwangi Village, Cibadak District, Sukabumi Regency, preliminary observation revealed that most households had not prepared a budget, had no emergency fund, did not separate business and personal finances, and still relied on high-interest informal loans known locally as "bank emok". This community service program aimed to improve the community's financial management knowledge, skills, and behavior as a foundation for household economic welfare. A participatory, andragogy-based approach was implemented in five stages: (1) coordination and preparation, (2) needs identification through focus group discussions, (3) training on six financial management literacy modules, (4) four weeks of mentoring on record-keeping and budgeting practice, and (5) evaluation using pre-tests, post-tests, behavioral observation, and a satisfaction questionnaire. Forty participants took part, consisting of housewives, MSME owners, workers, farmers, and youth. The mean literacy score increased from 49.55 to 79.80, with an N-gain of 0.60 (moderate) and a significant paired t-test ($t = 20.31$; $p < 0.001$). The share of participants in the good literacy category rose from 5.0% to 57.5%. Behaviorally, participants who regularly recorded expenses increased from 20.0% to 67.5%, and those with a written monthly budget increased from 15.0% to 60.0%. The program demonstrates that contextual, participatory financial education accompanied by mentoring can strengthen rural financial capability. Sustainability is recommended through village financial literacy cadres and synergy with village-owned enterprises (BUMDes), formal financial institutions, and the Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD).*

PENDAHULUAN

Literasi keuangan merupakan salah satu kecakapan hidup (*life skill*) yang paling

menentukan kualitas keputusan ekonomi rumah tangga. Kemampuan seseorang untuk memahami konsep keuangan dasar, menyusun anggaran, menabung, mengelola utang, serta memilih produk dan layanan keuangan yang tepat akan berdampak langsung pada stabilitas pendapatan, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan pada akhirnya kesejahteraan keluarga (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam kerangka pembangunan nasional, literasi keuangan tidak lagi dipandang sebagai urusan individu semata, tetapi sebagai prasyarat bagi inklusi keuangan yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai agenda strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi.

Perkembangan literasi keuangan nasional menunjukkan tren yang membaik, tetapi belum merata. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46%, naik dari 65,43% pada tahun 2024, sementara indeks inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51% dari 75,02% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Angka tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan sekitar 14 poin persentase antara tingkat penggunaan produk keuangan (inklusi) dan tingkat pemahaman terhadap produk tersebut (literasi). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat telah menggunakan layanan keuangan tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, hak, dan kewajibannya, sehingga rentan terhadap keputusan keuangan yang keliru, jeratan utang konsumtif, maupun penipuan investasi dan pinjaman daring ilegal.

Ketimpangan yang lebih tajam terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan. SNLIK 2025 mencatat indeks literasi keuangan perkotaan sebesar 70,89%, sedangkan perdesaan hanya 59,60%; adapun indeks inklusi keuangan perkotaan mencapai 83,61% berbanding 75,70% di perdesaan. Lebih jauh, kelompok masyarakat yang tidak atau belum pernah bersekolah hanya memiliki indeks literasi 43,20%, jauh di bawah kelompok berpendidikan tinggi yang mencapai 90,63% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Data ini menegaskan bahwa masyarakat desa, khususnya yang berpendidikan dasar dan bekerja di sektor informal, merupakan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi edukasi keuangan. Kondisi tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2023–2027 yang menekankan perluasan edukasi ke wilayah perdesaan, perempuan, dan pelaku usaha mikro.

Desa Sekarwangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2021, wilayah Kecamatan Cibadak terdiri atas Kelurahan Cibadak dan sembilan desa, yaitu Sekarwangi, Pamuruyan, Karangtengah, Neglasari, Warnajati, Tenjojaya, Ciheulang Tonggoh, Sukasirna, dan Batununggal. Desa Sekarwangi memiliki posisi yang relatif strategis karena berada dekat pusat pemerintahan kecamatan, jalur utama Sukabumi–Bogor, dan fasilitas publik penting seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi. Desa ini terdiri atas sejumlah kampung, di antaranya Kampung Cikiwul, Cimonyet, dan Cibatuhilir. Mata pencaharian masyarakat sangat beragam, mulai dari pedagang, pelaku usaha mikro, buruh pabrik dan buruh harian, pekerja jasa, hingga petani, dengan porsi pekerjaan informal yang cukup besar.

Keragaman mata pencaharian tersebut membawa konsekuensi pada pola pendapatan

rumah tangga yang tidak menentu. Pendapatan harian atau mingguan yang fluktuatif menuntut keterampilan mengelola arus kas yang baik agar kebutuhan pokok, pendidikan anak, kesehatan, dan modal usaha dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Di sisi lain, wilayah Desa Sekarwangi juga memiliki kerentanan terhadap bencana. Pada Januari 2024, misalnya, tanah longsor di Kampung Cibatuhilir merusak berat 12 rumah dan memaksa 15 kepala keluarga (51 jiwa) mengungsi. Peristiwa semacam ini menunjukkan pentingnya dana darurat dan proteksi keuangan sebagai bagian dari manajemen keuangan keluarga, sebab tanpa cadangan dana yang memadai, guncangan tak terduga dapat dengan cepat mendorong rumah tangga ke dalam jeratan utang.

Persoalan lain yang menonjol di wilayah Sukabumi adalah maraknya praktik pinjaman informal berbunga tinggi yang dikenal masyarakat sebagai "bank emok" atau bank keliling. Istilah *emok* dalam bahasa Sunda merujuk pada posisi duduk bersimpuh para ibu ketika transaksi dilakukan secara berkelompok di teras atau ruang tamu rumah warga. Praktik ini umumnya menyasar ibu rumah tangga dengan iming-iming pencairan cepat tanpa agunan dan sistem tanggung renteng, namun disertai bunga tinggi dan penagihan yang menekan. Pemerintah Kota Sukabumi bahkan meluncurkan program "Anti Nginjeum ka Rentenir" (Anyelir) sebagai upaya membebaskan warganya dari jeratan rentenir (Antara, 2019). Ketergantungan terhadap pinjaman informal semacam ini merupakan cerminan dari rendahnya literasi keuangan, terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal, serta ketiadaan perencanaan keuangan rumah tangga (Collins et al., 2009).

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan aparatur Desa Sekarwangi, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sejumlah pelaku usaha mikro, tim pengabdi mengidentifikasi beberapa permasalahan utama mitra. Pertama, sebagian besar rumah tangga belum menyusun anggaran bulanan secara tertulis dan tidak melakukan pencatatan pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak mengetahui ke mana uang mereka mengalir. Kedua, budaya menabung masih lemah dan hampir tidak ada keluarga yang secara sadar membangun dana darurat. Ketiga, pelaku usaha mikro umumnya mencampuradukkan uang usaha dengan uang keluarga, sehingga tidak dapat menghitung laba secara akurat dan modal usaha kerap tergerus kebutuhan konsumtif. Keempat, pemahaman tentang produk dan lembaga keuangan formal masih terbatas, sementara akses terhadap pinjaman informal dan pinjaman daring yang tidak berizin justru sangat mudah. Kelima, belum tersedia wadah pembelajaran keuangan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan penyuluhan satu arah yang bersifat seremonial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas edukasi keuangan sangat ditentukan oleh intensitas, relevansi materi dengan kebutuhan peserta, kedekatan waktu antara pembelajaran dan pengambilan keputusan (*just-in-time education*), serta adanya kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan secara langsung (Fernandes et al., 2014; Kaiser & Menkhoff, 2017). Meta-analisis terbaru terhadap 76 studi eksperimen bahkan menegaskan bahwa edukasi keuangan berdampak positif tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada perilaku keuangan seperti menabung, penganggaran, dan pengelolaan kredit (Kaiser et al., 2022). Atas dasar itu, kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif berbasis prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang memadukan pelatihan, praktik langsung, dan pendampingan.

Solusi yang ditawarkan tim pengabdi meliputi: (1) pelatihan literasi manajemen keuangan dalam enam modul yang disusun berdasarkan kebutuhan riil mitra; (2)

penyediaan perangkat praktis berupa buku kas keluarga, lembar anggaran bulanan, dan buku kas usaha sederhana; (3) pendampingan pascapelatihan selama empat minggu untuk membiasakan pencatatan dan penganggaran; (4) pengenalan produk dan lembaga keuangan formal serta cara memverifikasi legalitas lembaga keuangan; dan (5) pembentukan kader literasi keuangan desa sebagai agen keberlanjutan program.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sekarwangi mengenai konsep dasar manajemen keuangan pribadi, keluarga, dan usaha mikro; (2) meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyusun anggaran, mencatat arus kas, menabung, dan mengelola utang secara sehat; (3) mendorong perubahan perilaku keuangan yang lebih terencana serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal berbunga tinggi; dan (4) membangun mekanisme keberlanjutan edukasi keuangan di tingkat desa. Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Literasi Keuangan

Literasi keuangan didefinisikan secara beragam dalam literatur. Huston (2010) membedakan antara pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) dan literasi keuangan; menurutnya, literasi keuangan mencakup tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan. Remund (2010), setelah menelaah lebih dari seratus definisi, menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah ukuran sejauh mana seseorang memahami konsep-konsep keuangan kunci serta memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengelola keuangan pribadi melalui keputusan jangka pendek yang tepat dan perencanaan keuangan jangka panjang yang matang, dengan memperhatikan peristiwa kehidupan dan perubahan kondisi ekonomi.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melalui *International Network on Financial Education* (INFE) mengoperasionalkan literasi keuangan ke dalam tiga komponen, yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan (Atkinson & Messy, 2012; OECD, 2020). Kerangka ini kemudian diadopsi OJK dalam SNLIK, yang mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Definisi OJK tersebut secara eksplisit menautkan literasi keuangan dengan tujuan akhir berupa kesejahteraan, sehingga relevan dijadikan landasan kegiatan pengabdian ini.

OJK mengelompokkan tingkat literasi masyarakat ke dalam empat kategori, yaitu *well literate* (memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produknya, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban, serta memiliki keterampilan menggunakannya), *sufficient literate* (memiliki pengetahuan dan keyakinan namun belum memiliki keterampilan menggunakan), *less literate* (hanya memiliki pengetahuan), dan *not literate* (tidak memiliki pengetahuan, keyakinan, maupun keterampilan). Penggolongan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi tidak cukup dilakukan dengan transfer pengetahuan, melainkan harus menyentuh aspek keyakinan dan keterampilan praktis.

2.2 Manajemen Keuangan Pribadi dan Keluarga

Manajemen keuangan pribadi dan keluarga merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya keuangan rumah tangga untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Secara praktis, manajemen keuangan keluarga mencakup lima pilar utama: (1) penganggaran (*budgeting*), yaitu menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu; (2) pencatatan arus kas, yaitu mendokumentasikan setiap transaksi agar dapat dievaluasi; (3) tabungan dan dana darurat, yaitu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan masa depan dan antisipasi kejadian tak terduga; (4) pengelolaan utang, yaitu memastikan bahwa kewajiban cicilan berada dalam batas kemampuan bayar; serta (5) proteksi dan investasi, yaitu melindungi aset dan pendapatan keluarga serta menumbuhkan kekayaan dalam jangka panjang.

Salah satu metode penganggaran yang banyak diajarkan dalam edukasi keuangan adalah aturan 50/30/20, yaitu mengalokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta pelunasan utang. Untuk masyarakat berpendapatan rendah dan tidak tetap, metode tersebut sering kali perlu dimodifikasi, misalnya dengan prinsip "sisihkan di awal" (*pay yourself first*) dalam jumlah kecil namun konsisten, atau metode amplop yang membagi uang tunai ke dalam pos-pos pengeluaran. Kerangka *behavioral life-cycle hypothesis* dari Shefrin dan Thaler (1988) menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan *mental accounting*, yaitu memperlakukan uang secara berbeda menurut sumber dan peruntukannya. Kecenderungan ini justru dapat dimanfaatkan dalam edukasi, misalnya dengan memisahkan rekening atau amplop untuk tabungan agar tidak mudah terpakai.

Bagi pelaku usaha mikro, manajemen keuangan memiliki dimensi tambahan, yaitu pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi (*entity concept*), pencatatan transaksi usaha, perhitungan harga pokok dan laba, serta pengelolaan modal kerja. Pencampuran uang usaha dan uang keluarga merupakan salah satu penyebab utama stagnasi usaha mikro, karena pelaku usaha tidak mengetahui kinerja usahanya secara akurat dan cenderung mengambil keuntungan yang sebenarnya merupakan modal. Dengan demikian, edukasi manajemen keuangan di desa perlu mengintegrasikan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha secara bersamaan.

2.3 Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Kesejahteraan Ekonomi

Hubungan antara literasi keuangan dan kesejahteraan telah banyak dikaji. Lusardi dan Mitchell (2014) menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak merencanakan masa pensiun, mengakumulasi kekayaan, dan terhindar dari utang berbiaya tinggi. Di kawasan Asia, Grohmann (2018) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepemilikan produk keuangan formal dan perilaku menabung pada kelas menengah perkotaan. Xiao dan O'Neill (2016) memperluas konsep ini menjadi kapabilitas keuangan (*financial capability*), yaitu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan akses yang memungkinkan seseorang bertindak demi kepentingan keuangannya sendiri.

Kesejahteraan ekonomi dalam konteks keuangan rumah tangga dikonseptualisasikan sebagai kesejahteraan finansial (*financial well-being*). Consumer Financial Protection Bureau (2015) mendefinisikan kesejahteraan finansial sebagai kondisi ketika seseorang dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban keuangan saat ini dan yang sedang berjalan, merasa aman

terhadap masa depan keuangannya, serta mampu membuat pilihan yang memungkinkannya menikmati hidup. Definisi tersebut memuat empat elemen: kendali atas keuangan sehari-hari, kapasitas menyerap guncangan keuangan, berada di jalur untuk mencapai tujuan keuangan, dan kebebasan finansial untuk menentukan pilihan. Brüggen et al. (2017) menambahkan bahwa kesejahteraan finansial adalah persepsi mampu mempertahankan standar hidup saat ini dan yang diinginkan serta kebebasan finansial, yang dipengaruhi oleh faktor personal, kontekstual, dan intervensi seperti edukasi keuangan.

Dari perspektif pembangunan, Sen (1999) memandang kesejahteraan sebagai perluasan kapabilitas atau kebebasan substantif yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia hargai. Dalam kerangka ini, literasi keuangan dapat dipahami sebagai salah satu kapabilitas yang memperluas pilihan ekonomi rumah tangga, misalnya kemampuan untuk menolak tawaran pinjaman yang merugikan, kemampuan memanfaatkan layanan keuangan formal, dan kemampuan merencanakan pendidikan anak. Kajian tentang ekonomi kemiskinan juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya (*scarcity*) dapat menyita kapasitas kognitif sehingga rumah tangga miskin cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang mahal (Mullainathan & Shafir, 2013). Alat bantu sederhana seperti anggaran tertulis dan pencatatan kas berfungsi sebagai "perangkat komitmen" yang mengurangi beban kognitif tersebut.

2.4 Inklusi Keuangan dan Keuangan Informal di Perdesaan

Inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Namun, akses saja tidak cukup apabila tidak disertai pemahaman. Collins et al. (2009) dalam *Portfolios of the Poor* menunjukkan bahwa rumah tangga miskin sebenarnya mengelola keuangan secara aktif dan kompleks, tetapi mengandalkan instrumen informal yang mahal, tidak andal, dan berisiko. Karlan et al. (2014) menemukan bahwa hambatan menabung pada masyarakat berpendapatan rendah tidak semata-mata soal kecilnya pendapatan, melainkan juga biaya transaksi, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga formal, serta bias perilaku seperti kecenderungan mendahulukan konsumsi saat ini.

Fenomena bank emok di Jawa Barat merupakan contoh nyata dari keuangan informal yang mengisi kekosongan layanan formal. Mekanisme kelompok dengan tanggung renteng memang memberikan kemudahan akses, tetapi bunga yang tinggi, tenor yang pendek, dan pola gali lubang tutup lubang menyebabkan banyak keluarga terjebak dalam siklus utang. Dalam konteks inilah edukasi literasi keuangan berperan penting, yaitu membekali masyarakat dengan kemampuan menghitung biaya pinjaman yang sesungguhnya, menilai kemampuan bayar, membedakan utang produktif dan konsumtif, serta mengenali alternatif pembiayaan formal yang lebih murah dan aman, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi yang sehat, atau lembaga keuangan mikro berizin.

2.5 Pendekatan Pemberdayaan dan Pembelajaran Orang Dewasa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang efektif menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dikembangkan Chambers (1994) menekankan keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis potensi, dan merumuskan solusi. Sejalan dengan itu, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dari Kretzmann dan McKnight (1993) mengajak tim pengabdi untuk berangkat dari aset dan kekuatan yang sudah dimiliki komunitas, seperti kelompok PKK, majelis taklim, kelompok arisan, dan jaringan sosial yang

kuat, alih-alih hanya berfokus pada kekurangan.

Karena sasaran kegiatan adalah orang dewasa, prinsip andragogi menjadi landasan desain pembelajaran. Knowles et al. (2015) merumuskan enam asumsi pembelajar dewasa, yaitu kebutuhan untuk mengetahui alasan belajar, konsep diri yang mandiri, pengalaman sebagai sumber belajar, kesiapan belajar yang dipicu oleh tuntutan kehidupan nyata, orientasi pada pemecahan masalah, serta motivasi internal. Implikasinya, materi literasi keuangan harus dikaitkan langsung dengan persoalan sehari-hari peserta, disampaikan melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus, serta memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman. Selain itu, teori perilaku terencana (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku; oleh karena itu, pembentukan kelompok belajar dan kader desa diharapkan memperkuat norma sosial yang mendukung perilaku keuangan sehat.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu, Lokasi, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada bulan Juli hingga September 2026. Kegiatan inti berupa pelatihan diselenggarakan di Aula Kantor Desa Sekarwangi, sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan secara berkelompok di lingkungan RW dan secara individual di rumah atau tempat usaha peserta. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Sekarwangi, Tim Penggerak PKK Desa Sekarwangi, serta kelompok pelaku usaha mikro setempat. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi tempat, mengundang peserta, dan menjembatani komunikasi dengan tokoh masyarakat, sedangkan kader PKK berperan sebagai penggerak peserta dan calon kader literasi keuangan desa.

3.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Sekarwangi yang berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga dan/atau usaha mikro. Peserta dipilih secara purposif bersama pemerintah desa dan kader PKK dengan kriteria: (1) berdomisili di Desa Sekarwangi; (2) berusia minimal 18 tahun; (3) berperan dalam pengelolaan keuangan keluarga atau usaha; dan (4) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, termasuk pendampingan selama empat minggu. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh sebanyak 40 orang, yang terdiri atas ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, pekerja/buruh, petani, dan pemuda anggota karang taruna.

3.3 Pendekatan dan Tahapan Kegiatan

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis andragogi yang memadukan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, permainan edukatif, praktik langsung, dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan keyakinan untuk menerapkannya. Secara rinci, kegiatan dilaksanakan melalui lima tahap sebagai berikut.

1. **Tahap persiapan dan koordinasi.** Tim pengabdi melakukan audiensi dengan Kepala Desa Sekarwangi dan perangkat desa untuk menyampaikan rencana kegiatan, menyepakati jadwal, menentukan kriteria peserta, dan menyiapkan sarana. Pada tahap ini tim juga menyusun modul pelatihan, instrumen evaluasi, serta perangkat praktik berupa buku kas keluarga dan buku kas usaha sederhana.
2. **Tahap identifikasi kebutuhan.** Tim menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (*focus*

group discussion/FGD) bersama perwakilan peserta, kader PKK, dan perangkat desa untuk memetakan praktik pengelolaan keuangan yang berlaku, masalah yang dihadapi, serta aset sosial yang dapat dimanfaatkan. Pada tahap ini juga dilakukan *pre-test* untuk mengukur tingkat literasi awal peserta dan pendataan perilaku keuangan awal.

3. **Tahap pelatihan.** Pelatihan dilaksanakan dalam dua sesi tatap muka (masing-masing sekitar enam jam) yang mencakup enam modul literasi manajemen keuangan. Setiap modul diawali dengan pemantik berupa cerita atau kasus lokal, dilanjutkan pemaparan konsep, diskusi kelompok, simulasi, dan ditutup dengan rencana aksi pribadi.
4. **Tahap pendampingan.** Selama empat minggu setelah pelatihan, tim pengabdi bersama kader PKK mendampingi peserta dalam mempraktikkan pencatatan keuangan, penyusunan anggaran bulanan, dan penetapan target tabungan. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan kelompok mingguan di tingkat RW, kunjungan ke rumah atau tempat usaha, serta grup percakapan daring untuk konsultasi.
5. **Tahap evaluasi dan keberlanjutan.** Evaluasi dilakukan melalui *post-test*, observasi perubahan perilaku berdasarkan buku kas yang diisi peserta, kuesioner kepuasan, dan refleksi bersama. Pada akhir kegiatan dilakukan pembentukan kader literasi keuangan desa dan penyusunan rencana tindak lanjut bersama pemerintah desa.

Materi pelatihan disusun berdasarkan hasil FGD dan kerangka literasi keuangan OJK. Rincian modul, pokok bahasan, dan metode penyampaian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Modul Pelatihan Literasi Manajemen Keuangan

No	Modul	Pokok Bahasan	Metode
1	Dasar-dasar keuangan keluarga	Kebutuhan vs keinginan, tujuan keuangan keluarga, nilai waktu uang, inflasi	Ceramah interaktif, permainan "pohon kebutuhan"
2	Penganggaran dan pencatatan	Anggaran bulanan, metode amplop, modifikasi 50/30/20, buku kas keluarga	Simulasi penyusunan anggaran, praktik pencatatan
3	Tabungan dan dana darurat	Sisihkan di awal, target tabungan, besaran dan tempat menyimpan dana darurat	Studi kasus guncangan ekonomi, rencana aksi
4	Pengelolaan utang dan kredit	Utang produktif vs konsumtif, menghitung bunga efektif, rasio cicilan, bahaya bank emok	Simulasi perbandingan biaya pinjaman, diskusi
5	Produk dan lembaga keuangan formal	Tabungan, KUR, asuransi, koperasi, cek legalitas OJK (2L: Legal dan Logis), modus pinjol dan investasi ilegal	Demonstrasi, tanya jawab, kuis
6	Manajemen keuangan usaha mikro	Pemisahan uang usaha dan pribadi, buku kas usaha, harga pokok, laba, modal kerja	Praktik buku kas usaha, studi kasus UMKM lokal

Sumber: Disusun oleh tim pengabdi (2026)

3.4 Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dengan rincian jadwal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu	Pihak Terlibat
1	Audiensi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sekarwangi	Minggu ke-2 Juli 2026	Tim pengabdi, kepala desa, perangkat desa
2	Penyusunan modul, instrumen, dan perangkat praktik	Minggu ke-3 s.d. ke-4 Juli 2026	Tim pengabdi
3	FGD identifikasi kebutuhan dan pre-test	Sabtu, 1 Agustus 2026	Tim pengabdi, kader PKK, perwakilan peserta
4	Pelatihan sesi I (Modul 1–3)	Sabtu, 8 Agustus 2026	Tim pengabdi, 40 peserta
5	Pelatihan sesi II (Modul 4–6) dan post-test	Sabtu, 15 Agustus 2026	Tim pengabdi, 40 peserta
6	Pendampingan praktik pencatatan dan penganggaran	16 Agustus s.d. 12 September 2026	Tim pengabdi, kader PKK, peserta
7	Evaluasi perilaku, refleksi, dan pembentukan kader	Sabtu, 19 September 2026	Tim pengabdi, pemerintah desa, peserta
8	Penyusunan laporan dan artikel publikasi	Minggu ke-4 September 2026	Tim pengabdi

Sumber: Disusun oleh tim pengabdi (2026)

3.5 Teknik Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi dilakukan pada tiga tingkat, yaitu pengetahuan, perilaku, dan reaksi peserta. Evaluasi pengetahuan menggunakan tes tertulis berisi 30 butir soal pilihan ganda yang mencakup enam dimensi sesuai modul pelatihan. Soal disusun dalam bahasa yang sederhana dan dibacakan oleh fasilitator bagi peserta yang mengalami kesulitan membaca. Skor masing-masing dimensi dikonversi ke skala 0–100. Tingkat literasi peserta dikategorikan menjadi kurang (skor < 60), cukup (60–79), dan baik (≥ 80).

Efektivitas pelatihan dianalisis menggunakan dua teknik. Pertama, uji-t sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk menguji signifikansi perbedaan skor *pre-test* dan *post-test*, setelah sebelumnya dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap selisih skor. Kedua, perhitungan *normalized gain* (N-gain) menurut Hake (1998) dengan rumus g = (skor *post-test* − skor *pre-test*) / (skor maksimum − skor *pre-test*). Nilai g ≥ 0,70 dikategorikan tinggi, 0,30 ≤ g < 0,70 sedang, dan g < 0,30 rendah.

Evaluasi perilaku dilakukan dengan membandingkan kondisi awal (hasil pendataan pada tahap identifikasi kebutuhan) dan kondisi setelah pendampingan empat minggu, berdasarkan pemeriksaan buku kas, lembar anggaran, dan wawancara singkat. Adapun evaluasi reaksi dilakukan melalui kuesioner kepuasan berskala Likert 1–5. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Aspek	Indikator	Target
Pengetahuan	Peningkatan skor rata-rata literasi manajemen keuangan	N-gain minimal kategori sedang (≥ 0,30) dan signifikan (p <

Aspek	Indikator	Target
		0,05)
Pengetahuan	Proporsi peserta berkategori literasi baik	Minimal 50% peserta setelah pelatihan
Perilaku	Peserta yang rutin mencatat pengeluaran	Minimal 60% peserta
Perilaku	Peserta yang memiliki anggaran bulanan tertulis	Minimal 50% peserta
Perilaku	Pelaku UMKM yang memisahkan keuangan usaha dan pribadi	Minimal 50% pelaku UMKM
Reaksi	Kepuasan peserta terhadap kegiatan	Rata-rata ≥ 4,00 (skala 5)
Keberlanjutan	Terbentuknya kader literasi keuangan desa	Minimal 1 kader per RW sasaran

Sumber: Disusun oleh tim pengabdi (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Peserta

Kegiatan diikuti secara penuh oleh 40 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Desa Sekarwangi. Karakteristik peserta disajikan pada Tabel 4. Mayoritas peserta adalah perempuan (77,5%), yang mencerminkan peran dominan perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga sekaligus kelompok yang paling banyak menjadi sasaran pinjaman informal. Hampir separuh peserta (47,5%) berada pada kelompok usia produktif 31–45 tahun, yaitu fase kehidupan dengan beban tanggungan keluarga yang relatif besar, seperti biaya pendidikan anak dan cicilan.

Tabel 4. Karakteristik Peserta Kegiatan (n = 40)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Perempuan	31	77,5
	Laki-laki	9	22,5
Usia	18–30 tahun	8	20,0
	31–45 tahun	19	47,5
	46–60 tahun	11	27,5
	> 60 tahun	2	5,0
Pendidikan terakhir	SD/sederajat	9	22,5
	SMP/sederajat	12	30,0
	SMA/SMK/sederajat	16	40,0
	Diploma/Sarjana	3	7,5
Pekerjaan utama	Ibu rumah tangga	15	37,5
	Pelaku usaha mikro	14	35,0
	Buruh/karyawan	6	15,0
	Petani	3	7,5
	Lainnya (pemuda/karang taruna)	2	5,0

Sumber: Data kegiatan PkM (2026)

Dari sisi pendidikan, lebih dari separuh peserta (52,5%) hanya berpendidikan SD atau SMP. Kondisi ini sejalan dengan temuan SNLIK 2025 bahwa tingkat pendidikan berkorelasi kuat dengan literasi keuangan, sehingga desain materi harus menggunakan bahasa sederhana, banyak ilustrasi, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adapun dari sisi pekerjaan, ibu rumah tangga (37,5%) dan pelaku usaha mikro (35,0%) menjadi kelompok terbesar, sehingga materi penganggaran keluarga dan pengelolaan keuangan usaha mikro mendapat porsi penekanan yang seimbang.

4.2 Hasil Identifikasi Kebutuhan

FGD yang dilaksanakan pada tahap identifikasi kebutuhan menghasilkan gambaran yang cukup jelas mengenai praktik pengelolaan keuangan masyarakat. Sebagian besar peserta mengaku mengelola keuangan "mengalir saja", yaitu membelanjakan uang sesuai kebutuhan yang muncul tanpa perencanaan. Peserta juga mengungkapkan bahwa uang sering "habis tanpa terasa", terutama untuk jajan anak, pulsa dan kuota internet, serta sumbangan acara hajatan. Pelaku usaha mikro umumnya mengambil uang dari laci dagangan untuk kebutuhan dapur, sehingga pada akhir bulan tidak mengetahui apakah usahanya untung atau rugi.

Temuan penting lainnya adalah tingginya ketergantungan terhadap pinjaman informal. Sebanyak 15 peserta (37,5%) mengaku sedang memiliki pinjaman aktif dari bank emok atau rentenir, dan beberapa di antaranya memiliki pinjaman dari lebih dari satu kelompok. Alasan utama yang diungkapkan adalah prosesnya cepat, tidak memerlukan agunan maupun dokumen, serta petugas datang langsung ke rumah. Sebagian besar peserta tidak pernah menghitung berapa bunga efektif yang sebenarnya mereka bayar. Di sisi lain, peserta juga mengungkapkan aset sosial yang kuat, seperti kebiasaan arisan, pengajian rutin, dan solidaritas antartetangga, yang kemudian dimanfaatkan sebagai wahana pendampingan. Ringkasan kondisi awal perilaku keuangan peserta disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Awal Perilaku Keuangan Peserta

No	Indikator Perilaku	Jumlah	Persentase (%)
1	Rutin mencatat pengeluaran	8 dari 40	20,0
2	Memiliki anggaran bulanan tertulis	6 dari 40	15,0
3	Menyisihkan tabungan secara rutin	13 dari 40	32,5
4	Memiliki dana darurat (minimal 1 bulan pengeluaran)	4 dari 40	10,0
5	Memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal	22 dari 40	55,0
6	Memiliki pinjaman aktif dari bank emok/rentenir	15 dari 40	37,5
7	Memisahkan keuangan usaha dan pribadi (khusus pelaku UMKM)	3 dari 14	21,4
8	Pernah memeriksa legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi	5 dari 40	12,5

Sumber: Data kegiatan PkM (2026)

Data pada Tabel 5 memperlihatkan pola yang konsisten dengan kesenjangan literasi–inklusi pada tingkat nasional. Lebih dari separuh peserta (55,0%) telah memiliki rekening

tabungan formal, sebagian besar karena keperluan penyaluran bantuan sosial atau penerimaan gaji, tetapi hanya 32,5% yang menabung secara rutin dan hanya 10,0% yang memiliki dana darurat. Dengan kata lain, akses terhadap produk keuangan formal belum diikuti oleh pemanfaatan yang optimal. Rendahnya praktik pemeriksaan legalitas lembaga keuangan (12,5%) juga menunjukkan kerentanan peserta terhadap pinjaman daring dan investasi ilegal yang kini banyak menyasar masyarakat melalui telepon pintar.

4.3 Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan sesi pertama dilaksanakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, dan membahas Modul 1 sampai Modul 3. Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Sekarwangi yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga bagi ketahanan ekonomi desa. Modul 1 diawali dengan permainan "pohon kebutuhan", yaitu peserta menempelkan kartu bergambar berbagai jenis pengeluaran pada pohon yang dibagi menjadi akar (kebutuhan pokok), batang (kebutuhan penunjang), dan daun (keinginan). Permainan ini memicu diskusi yang hidup karena peserta menyadari bahwa sejumlah pengeluaran yang selama ini dianggap kebutuhan, seperti kuota internet berlebih dan jajan, sebenarnya termasuk keinginan yang dapat dikendalikan.

Modul 2 tentang penganggaran dan pencatatan merupakan inti pelatihan. Peserta dikenalkan pada buku kas keluarga yang dirancang khusus oleh tim pengabdi dengan format sederhana: tanggal, uraian, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Peserta kemudian menyusun anggaran bulanan berdasarkan pendapatan riil masing-masing. Mengingat banyak peserta memiliki pendapatan harian yang tidak menentu, tim memodifikasi aturan 50/30/20 menjadi prinsip "dahulukan kebutuhan pokok, sisihkan sedikit di awal, baru belanja keinginan", serta memperkenalkan metode amplop untuk pengelolaan uang tunai. Simulasi menunjukkan bahwa sebagian peserta baru menyadari besarnya pengeluaran kecil yang berulang setelah menuliskannya selama satu bulan hipotetis.

Modul 3 membahas tabungan dan dana darurat. Fasilitator menggunakan studi kasus keluarga yang rumahnya terdampak longsor sebagai pemantik, sebuah konteks yang sangat dekat dengan pengalaman warga Sekarwangi. Peserta diajak menghitung kebutuhan dana darurat ideal (tiga sampai enam kali pengeluaran bulanan) dan menyusun target bertahap yang realistis, misalnya dimulai dari dana darurat setara satu minggu pengeluaran. Peserta juga didorong untuk menyimpan dana darurat di tempat yang terpisah dari uang belanja, misalnya rekening tabungan atau celengan khusus yang tidak mudah dibuka.

Pelatihan sesi kedua dilaksanakan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dan membahas Modul 4 sampai Modul 6. Modul 4 tentang pengelolaan utang menjadi sesi yang paling banyak memancing diskusi. Melalui simulasi, peserta diajak menghitung biaya sesungguhnya dari pinjaman bank emok. Sebagai ilustrasi, pinjaman Rp1.000.000 yang harus dikembalikan dalam cicilan mingguan sebesar Rp30.000 selama 40 minggu berarti total pengembalian Rp1.200.000, atau setara biaya bunga sekitar 20% hanya dalam waktu kurang dari sepuluh bulan. Ketika simulasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga KUR mikro yang jauh lebih rendah, banyak peserta terkejut. Peserta juga dikenalkan pada rasio cicilan sehat, yaitu total cicilan sebaiknya tidak melebihi sepertiga pendapatan, serta strategi pelunasan utang dimulai dari utang berbunga tertinggi.

Modul 5 memperkenalkan produk dan lembaga keuangan formal, meliputi tabungan, KUR, asuransi mikro, koperasi, dan pegadaian, beserta manfaat dan risikonya. Fasilitator mendemonstrasikan cara memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui kontak resmi OJK

dan menekankan prinsip "2L", yaitu Legal (memiliki izin dari otoritas yang berwenang) dan Logis (imbal hasil atau syarat yang ditawarkan masuk akal). Peserta juga dikenalkan pada ciri-ciri pinjaman daring dan investasi ilegal, seperti penawaran melalui pesan pribadi, permintaan akses ke seluruh kontak di telepon, dan janji keuntungan tinggi tanpa risiko.

Modul 6 khusus membahas manajemen keuangan usaha mikro. Pelaku UMKM dikenalkan pada konsep pemisahan entitas, yakni bahwa usaha harus diperlakukan sebagai "orang lain" yang memiliki dompetnya sendiri. Peserta berlatih mengisi buku kas usaha, menghitung harga pokok produk, menentukan harga jual, serta menetapkan "gaji" untuk diri sendiri dari keuntungan usaha agar tidak mengambil uang usaha secara sembarangan. Peserta nonpelaku usaha tetap mengikuti modul ini karena banyak di antara mereka yang berencana merintis usaha sampingan. Sesi kedua ditutup dengan *post-test* dan penyusunan rencana aksi pribadi yang memuat target pencatatan, anggaran, dan tabungan selama empat minggu ke depan.

Secara umum, antusiasme peserta tinggi. Tingkat kehadiran pada kedua sesi mencapai 100% untuk 40 peserta yang terdaftar, dan diskusi berlangsung aktif. Penggunaan bahasa campuran Indonesia dan Sunda oleh fasilitator serta kader PKK terbukti membantu peserta yang kurang lancar memahami istilah keuangan. Penggunaan contoh-contoh lokal, seperti harga beras di pasar Cibadak, biaya sekolah anak, dan pola belanja menjelang hajatan, membuat materi terasa relevan dengan kehidupan peserta.

4.4 Peningkatan Pengetahuan Literasi Manajemen Keuangan

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pengetahuan yang konsisten pada seluruh dimensi literasi manajemen keuangan. Rekapitulasi skor rata-rata per dimensi beserta nilai N-gain disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Skor Rata-rata Pre-test, Post-test, dan N-gain per Dimensi (n = 40)

No	Dimensi Literasi	Pre-test	Post-test	Selisih	N-gain	Kategori
1	Pengetahuan dasar keuangan	58,50	82,30	23,80	0,57	Sedang
2	Penganggaran dan pencatatan	49,80	80,60	30,80	0,61	Sedang
3	Tabungan dan dana darurat	52,30	79,40	27,10	0,57	Sedang
4	Pengelolaan utang dan kredit	45,60	78,20	32,60	0,60	Sedang
5	Produk dan lembaga keuangan formal	47,20	81,50	34,30	0,65	Sedang
6	Manajemen keuangan usaha mikro	43,90	76,80	32,90	0,59	Sedang
	Rata-rata keseluruhan	49,55	79,80	30,25	0,60	Sedang

Sumber: Data kegiatan PkM (2026), diolah

Skor rata-rata keseluruhan meningkat dari 49,55 pada *pre-test* menjadi 79,80 pada *post-test*, atau naik sebesar 30,25 poin. Nilai N-gain keseluruhan sebesar 0,60 berada pada kategori sedang mendekati batas atas, yang berarti pelatihan mampu menutup sekitar 60% kesenjangan antara skor awal dan skor maksimum. Peningkatan terbesar terjadi pada dimensi produk dan lembaga keuangan formal (N-gain 0,65), diikuti dimensi penganggaran

dan pencatatan (0,61) serta pengelolaan utang dan kredit (0,60). Tingginya peningkatan pada dimensi produk dan lembaga keuangan diduga karena materi ini sebelumnya hampir tidak pernah diterima peserta, sehingga ruang peningkatannya besar, sementara demonstrasi pemeriksaan legalitas yang konkret memudahkan pemahaman.

Dimensi pengetahuan dasar keuangan memiliki skor awal tertinggi (58,50) karena konsep seperti membedakan kebutuhan dan keinginan relatif sudah dipahami secara intuitif oleh peserta. Sebaliknya, dimensi manajemen keuangan usaha mikro memiliki skor awal terendah (43,90) dan skor akhir terendah (76,80). Hal ini dapat dipahami karena materi seperti perhitungan harga pokok dan laba memerlukan keterampilan berhitung yang lebih kompleks, dan sebagian peserta bukan pelaku usaha sehingga kurang memiliki pengalaman kontekstual. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendampingan lanjutan yang lebih intensif dan spesifik bagi pelaku UMKM.

Untuk menguji signifikansi peningkatan, dilakukan uji-t sampel berpasangan. Uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap selisih skor menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji-t berpasangan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji-t Sampel Berpasangan

Pengukuran	Rata-rata	Simpangan Baku Selisih	t hitung	df	Sig. (2-tailed)
Pre-test	49,55				
Post-test	79,80				
Selisih (Post – Pre)	30,25	9,42	20,31	39	< 0,001

Sumber: Data kegiatan PkM (2026), diolah

Nilai t hitung sebesar 20,31 dengan derajat bebas 39 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa perbedaan skor sebelum dan sesudah pelatihan signifikan secara statistik. Dengan demikian, pelatihan literasi manajemen keuangan terbukti meningkatkan pengetahuan peserta secara bermakna. Perubahan distribusi kategori literasi peserta disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Distribusi Kategori Literasi Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Kategori	Rentang Skor	Pre-test (n)	Pre-test (%)	Post-test (n)	Post-test (%)
Kurang	< 60	27	67,5	2	5,0
Cukup	60–79	11	27,5	15	37,5
Baik	≥ 80	2	5,0	23	57,5
Jumlah		40	100,0	40	100,0

Sumber: Data kegiatan PkM (2026), diolah

Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta (67,5%) berada pada kategori literasi kurang dan hanya 5,0% yang berkategori baik. Setelah pelatihan, komposisi tersebut berbalik: 57,5% peserta berkategori baik, 37,5% cukup, dan hanya 5,0% yang masih berkategori kurang. Dua peserta yang masih berkategori kurang merupakan peserta lanjut usia dengan latar belakang pendidikan dasar yang mengalami kesulitan membaca, sehingga tim memberikan pendampingan individual dengan melibatkan anggota keluarga mereka.

Capaian proporsi peserta berkategori baik sebesar 57,5% telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu minimal 50%.

4.5 Perubahan Perilaku Keuangan Setelah Pendampingan

Peningkatan pengetahuan merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup bagi perbaikan kesejahteraan. Literatur menunjukkan bahwa efek edukasi keuangan terhadap perilaku cenderung melemah seiring waktu apabila tidak disertai praktik dan penguatan (Fernandes et al., 2014). Oleh karena itu, kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan selama empat minggu. Selama pendampingan, kader PKK dan tim pengabdi mengadakan pertemuan kelompok mingguan yang dikaitkan dengan agenda arisan dan pengajian rutin warga, memeriksa buku kas peserta, membantu peserta yang kesulitan, serta memberikan apresiasi kepada peserta yang konsisten. Grup percakapan daring juga dimanfaatkan untuk berbagi pengingat harian mengisi buku kas dan menjawab pertanyaan. Perbandingan kondisi perilaku sebelum kegiatan dan setelah pendampingan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perubahan Perilaku Keuangan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Indikator Perilaku	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Perubahan (poin %)
1	Rutin mencatat pengeluaran	20,0	67,5	+47,5
2	Memiliki anggaran bulanan tertulis	15,0	60,0	+45,0
3	Menyisihkan tabungan secara rutin	32,5	62,5	+30,0
4	Mulai membangun dana darurat	10,0	45,0	+35,0
5	Memiliki rekening tabungan formal	55,0	72,5	+17,5
6	Memisahkan keuangan usaha dan pribadi (n = 14 UMKM)	21,4	64,3	+42,9
7	Memeriksa legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi*	12,5	70,0	+57,5

*Sumber: Data kegiatan PkM (2026), diolah. *Diukur sebagai pernyataan kesiapan dan praktik saat menerima tawaran pinjaman/investasi selama periode pendampingan.*

Tabel 9 menunjukkan perubahan perilaku yang berarti dalam waktu yang relatif singkat. Peserta yang rutin mencatat pengeluaran meningkat dari 20,0% menjadi 67,5%, sedangkan peserta yang memiliki anggaran bulanan tertulis meningkat dari 15,0% menjadi 60,0%. Kedua indikator ini telah melampaui target masing-masing, yaitu 60% dan 50%. Pada kelompok pelaku UMKM, proporsi yang memisahkan keuangan usaha dan pribadi meningkat dari 21,4% (3 orang) menjadi 64,3% (9 orang). Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa setelah dua minggu mencatat, mereka baru mengetahui bahwa keuntungan usahanya lebih kecil daripada yang selama ini dibayangkan karena sebagian modal terpakai untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada aspek tabungan, peserta yang menyisihkan tabungan secara rutin meningkat dari 32,5% menjadi 62,5%, dan yang mulai membangun dana darurat meningkat dari 10,0% menjadi 45,0%. Meskipun nominal tabungan masih relatif kecil, misalnya Rp5.000 hingga Rp20.000 per hari, pembentukan kebiasaan menabung merupakan langkah awal yang penting. Tujuh peserta membuka rekening tabungan baru di lembaga keuangan formal selama periode pendampingan, sehingga proporsi peserta yang memiliki rekening

meningkat menjadi 72,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih berkualitas.

Terkait pinjaman informal, dari 15 peserta yang memiliki pinjaman aktif dari bank emok atau rentenir, 12 orang menyatakan berkomitmen untuk tidak mengambil pinjaman baru dan telah menyusun rencana pelunasan berdasarkan urutan bunga tertinggi. Tim pengabdi tidak mengklaim adanya penurunan jumlah peminjam dalam empat minggu pendampingan, karena pelunasan pinjaman memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun demikian, munculnya kesadaran dan rencana pelunasan merupakan indikasi awal perubahan sikap terhadap utang. Beberapa peserta juga mulai mendiskusikan kemungkinan pembiayaan alternatif melalui KUR dan koperasi yang sehat untuk kebutuhan modal usaha.

4.6 Tingkat Kepuasan Peserta

Evaluasi reaksi peserta dilakukan melalui kuesioner kepuasan dengan skala Likert 1–5. Hasilnya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Rata-rata Skor	Kategori
1	Relevansi materi dengan kebutuhan sehari-hari	4,63	Sangat puas
2	Kemudahan memahami materi	4,38	Sangat puas
3	Kemampuan fasilitator dalam menyampaikan materi	4,55	Sangat puas
4	Kebermanfaatan perangkat praktik (buku kas, lembar anggaran)	4,60	Sangat puas
5	Kebermanfaatan kegiatan pendampingan	4,48	Sangat puas
6	Kesesuaian waktu dan tempat pelaksanaan	4,18	Puas
	Rata-rata keseluruhan	4,47	Sangat puas

Sumber: Data kegiatan PkM (2026), diolah. Kategori: 1,00–1,80 sangat tidak puas; 1,81–2,60 tidak puas; 2,61–3,40 cukup; 3,41–4,20 puas; 4,21–5,00 sangat puas.

Rata-rata kepuasan keseluruhan sebesar 4,47 termasuk kategori sangat puas dan melampaui target minimal 4,00. Aspek dengan skor tertinggi adalah relevansi materi dengan kebutuhan sehari-hari (4,63) dan kebermanfaatan perangkat praktik (4,60). Hal ini mengonfirmasi bahwa materi yang kontekstual dan alat bantu yang dapat langsung digunakan merupakan faktor kunci keberhasilan edukasi keuangan bagi masyarakat desa. Aspek dengan skor terendah adalah kesesuaian waktu pelaksanaan (4,18); sebagian peserta, terutama pelaku usaha dan pekerja, menyarankan agar pelatihan dibagi menjadi sesi yang lebih pendek namun lebih sering, sehingga tidak mengganggu aktivitas mencari nafkah.

4.7 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan literasi manajemen keuangan yang disertai pendampingan efektif meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat Desa Sekarwangi. Temuan ini konsisten dengan meta-analisis Kaiser et al. (2022) yang menunjukkan bahwa edukasi keuangan berdampak positif terhadap pengetahuan dan perilaku hilir, seperti penganggaran dan menabung. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Kaiser dan Menkhoff (2017) bahwa efektivitas edukasi keuangan lebih tinggi ketika program dirancang dengan intensitas yang memadai, menyasar kelompok berpendapatan rendah, dan dikaitkan dengan momen pengambilan keputusan yang nyata.

Keberhasilan kegiatan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, desain pembelajaran berbasis andragogi membuat peserta merasa materi relevan dengan masalah mereka. Sesuai asumsi Knowles et al. (2015), orang dewasa belajar secara optimal ketika memahami alasan mengapa suatu materi penting dan ketika pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Simulasi menghitung biaya pinjaman bank emok, misalnya, memberikan "momen kesadaran" (*aha moment*) yang kuat karena peserta melihat secara langsung kerugian yang selama ini tidak disadari. Kedua, penyediaan perangkat praktis berupa buku kas dan lembar anggaran menurunkan hambatan untuk memulai perilaku baru. Dalam kerangka ekonomi perilaku, perangkat semacam ini berfungsi sebagai *nudge* yang memudahkan pilihan yang lebih baik tanpa membatasi kebebasan (Thaler & Sunstein, 2008).

Ketiga, pendampingan yang memanfaatkan aset sosial komunitas, seperti kelompok arisan, pengajian, dan kader PKK, terbukti memperkuat perubahan perilaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ABCD (Kretzmann & McKnight, 1993) yang berangkat dari kekuatan komunitas. Pertemuan kelompok mingguan menciptakan norma sosial baru bahwa mencatat keuangan dan menabung adalah kebiasaan yang baik dan wajar, sehingga memperkuat norma subjektif dan persepsi kendali perilaku sebagaimana dijelaskan dalam teori perilaku terencana (Ajzen, 1991). Peserta saling mengingatkan dan berbagi kiat, misalnya cara menyiasati pengeluaran hajatan atau cara menyimpan uang agar tidak mudah terpakai. Keempat, keterlibatan pemerintah desa memberikan legitimasi dan memudahkan mobilisasi peserta, sekaligus membuka peluang integrasi program ke dalam agenda desa.

Dari perspektif kesejahteraan ekonomi, perubahan perilaku yang dicapai menyentuh langsung elemen-elemen kesejahteraan finansial menurut Consumer Financial Protection Bureau (2015). Kebiasaan menyusun anggaran dan mencatat pengeluaran meningkatkan kendali atas keuangan sehari-hari. Pembentukan dana darurat meningkatkan kapasitas menyerap guncangan, yang sangat relevan bagi warga Sekarwangi yang wilayahnya rentan bencana. Penyusunan rencana pelunasan utang dan penolakan terhadap pinjaman baru berbunga tinggi membantu keluarga keluar dari siklus utang dan menempatkan mereka di jalur mencapai tujuan keuangan. Sementara itu, bagi pelaku UMKM, pemisahan keuangan usaha dan pribadi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan usaha dan akses terhadap pembiayaan formal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan hasil jangka panjang yang dipengaruhi oleh banyak faktor di luar literasi keuangan, seperti tingkat pendapatan, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, dan kebijakan publik. Banerjee dan Duflo (2011) mengingatkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan edukasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan sebaiknya dipandang sebagai fondasi yang memperkuat kapabilitas rumah tangga untuk memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal, bukan sebagai solusi tunggal. Dalam kerangka Sen (1999), literasi keuangan memperluas kebebasan substantif masyarakat untuk membuat pilihan ekonomi yang lebih baik, tetapi pilihan tersebut tetap memerlukan tersedianya peluang ekonomi dan akses layanan keuangan yang terjangkau.

Kegiatan ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya menyesuaikan edukasi keuangan dengan karakteristik ekonomi lokal. Aturan penganggaran standar seperti 50/30/20 kurang sesuai bagi rumah tangga berpendapatan harian yang tidak menentu, sehingga perlu dimodifikasi menjadi prinsip yang lebih fleksibel. Demikian pula, edukasi

tentang bahaya pinjaman informal tidak akan efektif apabila hanya bersifat melarang tanpa menawarkan alternatif. Masyarakat meminjam ke bank emok bukan semata-mata karena kurang pengetahuan, melainkan karena kebutuhan mendesak dan terbatasnya alternatif yang mudah diakses. Karena itu, penguatan dana darurat, pengenalan pembiayaan formal yang terjangkau, dan pengembangan lembaga keuangan berbasis komunitas yang sehat perlu berjalan beriringan dengan edukasi.

4.8 Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (1) komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Desa Sekarwangi dalam memfasilitasi tempat dan mobilisasi peserta; (2) peran aktif kader PKK sebagai penghubung dan pendamping di tingkat RW; (3) antusiasme peserta yang tinggi karena materi dirasakan relevan dengan persoalan sehari-hari; dan (4) kuatnya modal sosial masyarakat dalam bentuk kelompok arisan dan pengajian yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendampingan.

Adapun faktor penghambat yang ditemui meliputi: (1) keterbatasan waktu peserta, khususnya pelaku usaha dan pekerja harian, yang menyebabkan sebagian peserta tidak dapat mengikuti seluruh pertemuan kelompok pendampingan; (2) keragaman tingkat pendidikan dan kemampuan berhitung peserta, sehingga fasilitator perlu menyesuaikan kecepatan penyampaian materi; (3) adanya rasa sungkan sebagian peserta untuk terbuka mengenai kondisi utang mereka; dan (4) periode pendampingan empat minggu yang relatif singkat untuk mengamati perubahan perilaku jangka panjang, seperti pelunasan utang dan akumulasi dana darurat yang memadai. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim menerapkan pendampingan individual bagi peserta yang memerlukan, menjamin kerahasiaan data keuangan peserta, serta merancang mekanisme keberlanjutan melalui kader desa.

4.9 Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan, pada akhir kegiatan dibentuk kader literasi keuangan Desa Sekarwangi yang terdiri atas kader PKK dan peserta dengan capaian terbaik. Kader dibekali modul ringkas, contoh buku kas, serta panduan memfasilitasi pertemuan kelompok. Kader bertugas melanjutkan pertemuan bulanan, mendampingi warga yang ingin mulai mencatat keuangan, serta menjadi rujukan pertama ketika warga menerima tawaran pinjaman atau investasi yang mencurigakan. Selain itu, tim pengabdi bersama pemerintah desa menyusun rencana tindak lanjut yang meliputi: (1) integrasi edukasi keuangan ke dalam agenda rutin PKK dan posyandu; (2) penjajakan kerja sama dengan BUMDes, koperasi, dan lembaga jasa keuangan formal untuk program tabungan berkelompok dan pembiayaan usaha mikro yang terjangkau; (3) koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sukabumi dan kantor OJK setempat untuk program edukasi lanjutan; serta (4) pelatihan lanjutan bagi pelaku UMKM mengenai pencatatan keuangan digital dan akses pembiayaan KUR.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk peningkatan literasi manajemen keuangan di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah terlaksana dengan baik dan mencapai seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pertama, pelatihan enam modul literasi manajemen keuangan meningkatkan skor rata-rata

pengetahuan peserta dari 49,55 menjadi 79,80 dengan N-gain 0,60 (kategori sedang) dan perbedaan yang signifikan secara statistik ($t = 20,31$; $p < 0,001$). Proporsi peserta berkategori literasi baik meningkat dari 5,0% menjadi 57,5%. Kedua, pendampingan selama empat minggu mendorong perubahan perilaku keuangan yang nyata, ditandai dengan meningkatnya peserta yang rutin mencatat pengeluaran (dari 20,0% menjadi 67,5%), memiliki anggaran bulanan tertulis (dari 15,0% menjadi 60,0%), menabung secara rutin (dari 32,5% menjadi 62,5%), mulai membangun dana darurat (dari 10,0% menjadi 45,0%), serta pelaku UMKM yang memisahkan keuangan usaha dan pribadi (dari 21,4% menjadi 64,3%). Ketiga, peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi (rata-rata 4,47 dari 5), terutama terhadap relevansi materi dan kebermanfaatan perangkat praktik. Keempat, terbentuknya kader literasi keuangan desa menjadi modal bagi keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan yang kontekstual, partisipatif, berbasis prinsip pembelajaran orang dewasa, serta disertai perangkat praktis dan pendampingan, mampu memperkuat kapabilitas finansial masyarakat desa sebagai fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pengalaman pelaksanaan kegiatan, beberapa saran dapat diajukan. Bagi Pemerintah Desa Sekarwangi, disarankan untuk mengintegrasikan program literasi keuangan ke dalam rencana kerja desa dan mengalokasikan dukungan bagi kegiatan kader literasi keuangan, serta mendorong BUMDes untuk mengembangkan layanan simpan pinjam yang sehat sebagai alternatif pinjaman informal. Bagi masyarakat, disarankan untuk terus mempertahankan kebiasaan mencatat, menganggarkan, dan menabung, serta senantiasa memeriksa legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi. Bagi perguruan tinggi dan pelaksana pengabdian selanjutnya, disarankan untuk melaksanakan pendampingan dengan durasi yang lebih panjang (minimal tiga hingga enam bulan) agar dapat mengukur dampak terhadap pelunasan utang, akumulasi tabungan, dan indikator kesejahteraan finansial secara lebih komprehensif; mengembangkan modul pencatatan keuangan digital yang sederhana bagi pelaku UMKM; serta memperluas sasaran kegiatan ke kelompok remaja dan pemuda sebagai investasi literasi keuangan jangka panjang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Sekarwangi beserta jajaran perangkat desa, Tim Penggerak PKK Desa Sekarwangi, para ketua RT dan RW, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Antara. (2019). *Bebas jeratan rentenir, Pemkot Sukabumi beri solusi pada warganya*. Antara

News Megapolitan. https://megapolitan.antaranews.com/berita/79875/bebas-jeratan-rentenir-pemkot-sukabumi-beri-solusi-pada-warganya

Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study* (OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 15). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.

Brüggen, E. C., Hogreve, J., Holmlund, M., Kabadayi, S., & Löfgren, M. (2017). Financial well-being: A conceptualization and research agenda. *Journal of Business Research, 79*, 228–237. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.013

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development, 22*(7), 953–969. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (2009). *Portfolios of the poor: How the world's poor live on $2 a day*. Princeton University Press.

Consumer Financial Protection Bureau. (2015). *Financial well-being: The goal of financial education*. CFPB.

Fernandes, D., Lynch, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science, 60*(8), 1861–1883. https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849

Grohmann, A. (2018). Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class. *Pacific-Basin Finance Journal, 48*, 129–143. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.01.007

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics, 145*(2), 255–272. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022

Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when? *The World Bank Economic Review, 31*(3), 611–630. https://doi.org/10.1093/wber/lhx018

Karlan, D., Ratan, A. L., & Zinman, J. (2014). Savings by and for the poor: A research review and agenda. *Review of Income and Wealth, 60*(1), 36–78. https://doi.org/10.1111/roiw.12101

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. Times

Books.
OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD Publishing.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peta jalan pengembangan dan penguatan literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2023–2027*. OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2025*. OJK dan Badan Pusat Statistik.
Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Kecamatan Cibadak dan Desa-Desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x
Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
Shefrin, H. M., & Thaler, R. H. (1988). The behavioral life-cycle hypothesis. *Economic Inquiry, 26*(4), 609–643. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1988.tb01520.x
Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Xiao, J. J., & O'Neill, B. (2016). Consumer financial education and financial capability. *International Journal of Consumer Studies, 40*(6), 712–721. https://doi.org/10.1111/ijcs.12285

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSOGKAN